

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	25
1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	25
2. Kewenangan, Tugas dan Kewajiban PPAT	29

B. Tinjauan Tentang Tata Ruang Dan Perumahan	32
1. Pengertian Tata Ruang	32
2. Tujuan Penataan Ruang	33
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang	35
4. Tinjauan tentang Perumahan	37
C. Pengertian Developer Definisi Hak Kewajiban	
Tanggung Jawab sebagai Pelaku Usaha Perumahan.....	38
1. Hak-Hak Developer.....	39
2. Kewajiban Developer.....	40
3. Tanggung Jawab Developer	41
D. Tinjauan Tentang Perda Kota Semarang Nomor 6	
Tahun 2015	44
1. Pengertian Prasarana, Sarana, Dan Utilitas	
Kawasan Perumahan... ..	44
2. Kewenangan Pemerintah Kota Semarang	46
E. Tinjauan umum tentang fasilitas sosial dan fasilitas	
umum	47
1. Pengertian fasilitas sosial dan fasilitas umum.....	47
2. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas	
(fasilitas sosial dan fasilitas umum)	47
F. Tinjauan Tanah Menurut Hukum Islam.....	50
1. Filosofi Kepemilikan Tanah.....	51
2. Kepemilikan Tanah dan Implikasinya.....	53

3. Cara-Cara Memperoleh Kepemilikan Tanah	57
4. Hilangnya Hak Kepemilikan Tanah Pertanian.....	58
5. Pemanfaatan Tanah (<i>At-Tasharruf Fi Al-Ardh</i>)	59
6. Larangan Menyewakan Lahan Pertanian	60
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran PPAT dalam Penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari Pengembang ke Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	62
B. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi PPAT Dalam Penyerahan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Kepada Pemerintah Kota Semarang	69
1. Tahap Pra Transaksi	69
2. Tahap Transaksi	71
3. Tahap Purna/Pasca Transaksi.....	72
4. Pengawasan yang kurang dari Pemerintah Terhadap Pengadaan dan pengelolaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum oleh <i>Developer</i> di Kota Semarang	74
C. Akibat Hukum Peran PPAT Dalam Penyerahan	

Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Dari Pengembang Kepada Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman.....	80
1. Ketentuan Pemerintah Daerah Terkait Penyediaan Prasarana dan Sarana.....	80
2. Pengadaan dan Pengelolaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	85
BAB IV : PENUTUP	
A. Simpulan	94
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN